



Implementasi kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid-19 di Kampung Wisata Warungboto

Implementation of Covid-19 control and prevention policies in Warungboto Tourism Village

Ardiyati¹, Mei Maimunah², Ferri Wicaksono³, Hanantyo Sri Nugroho⁴

Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email Correspondence: ardiyati@amikom.ac.id

Abstract

This study aims to determine the extent to which Corona virus control policies have been implemented in the tourist village of Warung Boto. This research uses descriptive qualitative method. The theory used is the theory of public policy implementation from George Edward III. The results of the study show that self-assessment control standards and assessment results have not been carried out by the Boto Warung tourism village due to uncertain pandemic conditions and crowd restrictions. Managers feel that their own assessment is more focused on tourist objects, not tourist villages. Many standard facilities and infrastructure are available with assistance from various parties, especially from the Department of Tourism. Standards for the availability of human resources in the control and prevention of Covid-19 are available in collaboration with the urban village covid handling group. Standard SOP procedure documents are available. Funding sources still rely on assistance from stakeholders regarding the control and prevention of Covid-19. Communication between organizations in the tourism village network, the village Covid-19 control and prevention group and the tourism office is very important to reduce limited resources. The legality of the tourism village management organization strongly supports access to funding for various parties. The management status of the Boto shop location is one of the obstacles to the weak control and prevention of Covid-19 in the tourist village of Boto stalls.

Keywords: *Implementation, Prevention, Covid-19, Tourist villag*

Pendahuluan

Virus Covid-19 mulai mewabah dan menjadi pandemi di seluruh dunia pada awal tahun 2020. Pandemi ini juga melanda Indonesia sejak bulan Maret

2020 dan sampai dengan penelitian ini dibuat pada 24 Maret 2021 Wabah Virus Covid-19 di Indonesia jumlah terkonfirmasi positif berjumlah 4.554 orang perhari dan total sejumlah 1.636.792. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pandemi Virus Covid-19 juga jumlah terkonfirmasi positif sejumlah 223 kasus. Pandemi Covid-19 menular melalui penyebaran duplet dari orang yang terinfeksi. Pencegahan penularan dapat dilakukan dengan menjaga jarak (*social distancing*) mengurangi kerumunan dan menjaga kebersihan melalui mencuci tangan menjadi salah satu pencegahan. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing*, pengurangan mobilitas masyarakat dan perubahan gaya hidup masyarakat dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan disinfektan. Muncul kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan mobilitas masyarakat berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Pariwisata sebagai salah satu aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang mendorong mobilitas masyarakat untuk melakukan wisata. Pemerintah sehingga aktivitasnya juga memerlukan pembatasan. Pemerintah Kota Yogyakarta pernah melakukan penutupan tempat wisata seiring dengan adanya kebijakan tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal* yang diikuti oleh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Kebijakan pencegahan dan pengendalian virus corona diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Kebijakan tersebut menjadi acuan Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta yang salah satu isi dari kebijakan ini adalah perlunya protokol umum dan khusus dalam pengendalian virus Covid-19 di berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, pariwisata. Protokol umum dan khusus dalam pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 bidang pariwisata diatur dalam surat Edaran Walikota No 443/11652/SE/2020 tentang penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Bidang Pariwisata. Kebijakan tersebut mengatur tentang standar dan prosedur bagaimana pencegahan dan pengendalian corona virus di Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), bidang usaha penyediaan akomodasi, serta bidang usaha jasa makanan dan minuman. Kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 mewajibkan pengelola obyek daya tarik wisata untuk melakukan self assesment terhadap upaya pencegahan dan pengendalian corona disease oleh pengelola obyek wisata dan punishment jika melakukan pelanggaran.

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan ke suatu daerah tanpa menetap untuk bersenang senang atau memenuhi rasa ingin tahu di waktu libur (Unesco, 2009). Definisi pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Eva Latifah Puspita Sari dan Dyah Widiyastuti, 2019). Kampung wisata atau bisa juga disebut desa wisata menurut peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata merupakan integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku (Eva Latifah Puspita Sari dan Dyah Widiyastuti, 2019). Penyebutan kampung wisata dan desa wisata sesungguhnya memiliki perbedaan kampung identik dengan penyebutan wilayah di perkotaan sedang kan desa identik dengan penyebutan suatu wilayah di pedesaan. Pariwisata Perkotaan merupakan urban tourism merupakan suatu bentuk pengembangan pariwisata dengan lokasi wisata berada di dalam kota, dimana area atau spot spot di dalam kota, elemen-elemen kota menjadi komoditas utama (Rizal Kurniasih dan Muhammad Sultan Hali, 2018). Sedangkan skenario pengembangan wisata pedesaan adalah mengoptimalkan lembaga lokal, program pengembangan sumberdaya manusia, membuat program pemasaran pariwisata dan berbasis pada masyarakat petani (Made Antara dan Nyoman Sukma Arida. 2015).

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik merupakan pilihan pilihan apapun oleh pemerintah baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Budi Winarno, 2007). Menurut Meter dan Horn terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) Karakteristik agen pelaksana, dan (5) kondisi sosial ekonomi dan politik (Agustinus Subarsono, 2012). Kebijakan Pencegahan Covid-19 di tempat wisata di Kota Yogyakarta berupa Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/11652/SE/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 tentang Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Bidang Usaha Pariwisata. Adapun Isi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bidang usaha pariwisata adalah pemilik/pengelola usaha pariwisata wajib:

1. Mengikuti Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta
2. Mengisi formulir surat pernyataan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi usahanya.
3. Melaksanakan Self Assesment (penilaian mandiri) penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
4. Mengirimkan surat pernyataan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) kepada tim verifikasi Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19 di bidang Usaha Pariwisata Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

5. Penerbitan Surat Keterangan hasil Verifikasi oleh Tim dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
6. Surat Keterangan Hasil verifikasi tidak berlaku apabila timbul kasus penularan
7. Setelah masa penutupan lokasi usaha maka pemilik/pengelola usaha pariwisata mengulangi langkah dari membuat surat pernyataan bersedia melakukan pengendalian dan pencegahan Covid-19.
8. Bidang usaha pariwisata menerapkan sistem reservasi dan pendataan wisatawan menggunakan sistem digital.

Acuan Pengendalian dan Pencegahan Covid-19 di Kota Yogyakarta juga mengacu pada surat edaran Kepala Dinas Pariwisata 556/266/SE/VIII/2020 tentang Self Assesment Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease di Bidang Usaha Pariwisata untuk Daya Tarik Wisata, Penyediaan Akomodasai dan Penyediaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Isi Kebijakan tersebut meliputi kepemilikan standar sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan prosedur terkait pengendalian dan pencegahan Covid-19 di obyek wisata.

1. Standar Sarana dan Prasarana. Standar sarana dan prasarana meliputi tandar operasional sarana obyek wisata dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19 meliputi kepemilikan terhadap: (a) audio announcer, (b) wastafel tempat mencuci tangan, (c) rambu-rambu menjaga jarak minimal 1 meter, (d) alat penyembrot sabun, (e) cairan disinfektan, (f) QR qode, (g) tempat pembuatan sampah tertutup, (h) alat kebersihan. Standar Sumber Daya Manusia.
2. Standar Sumber Daya Manusia. Standar Sumber Daya Manusia untuk pengendalian dan pencegahan covid-19 meliputi (a) pembentukan gugus tugas pencegahan covid-19, (b) petugas pengukur suhu/pendataan, (c) petugas audio announcer.
3. Standar Prosedur. Standar Prosedur pengendalian dan pencegahan covid-19 meliputi (a) surat keputusan tentang gugus tugas pengawas protokol kesehatan, melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat, (b) ceklist harian tentang penerapan sop, (c) melakukan disinfektan lokasi minimal 3 hari sekali, (d) memastikan pengelola dalam keadaan sehat, (e) pemeriksaan kesehatan bagi pengelola, (f) daftar nomor telepon BPBD, (g) fasilitas kesehatan rujukan covid dan kepolisian, (h) pengecekan suhu bagi petugas dan wisatawan, (i) pembersihan dengan air bersih, (j) wajib masker, (k) scan barcode bagi pengunjung, (l) himbauan memenuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, (m) disinfeksi secara berkala

tempat yang sering disentuh, mengisi checklist harian, pengelolaan data harian pengunjung

Obyek wisata warung boto merupakan obyek wisata dengan daya tarik adanya situs bangunan cagar budaya petilasan umbul warungboto yang merupakan bagian dari pesanggrahan Rejowinangun yang didirikan oleh Hamengkubuwono II (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2018). Selain daya tarik situs umbul petilasan, Kampung Wisata Warung Boto juga memiliki daya tarik pabrik wojo, seni karawitan, kesenian kethoprak, seni pertunjukan guyon maton, seni sastra jawa mocapat, seni tarik klasik dna tari garapan, jatilan, reog, dan kesenian musik modern (band), seni keparajuritan rakyat dan seni keronong. Kampung Wisata Warungboto seluas 86,6 hektar yang secara kewilayahan berada di wilayah kecamatan Umbulharjo yang bedekatan dengan obyek wisata Ex. T Square serta Kebun Raya Gembira Lokal. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di obyek wisata kampung wisata warung boto. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pengendalian Covid-19 di obyek wisata di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memberikan masukan bagi pengendalian dan pencegahan Covid-19 di kampung wisata sehingga dapat kegiatan pariwisata dapat menjadi aman dan nyaman.

Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian dampak Covid-19 di obyek wisata kampung wisata warung boto. Obyek Wisata Kampung wisata dipilih dengan tujuan melihat kemampuan sumberdaya yang terbatas serta dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dna pengendalian dampak Covid-19. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia (Lexy J. Moleong, 2010). Penelitian Deskriptif merupakan penelitian untuk menemukan gejala suatu keadaan pada saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis tetapi hanya menggambarkan suatu variabel, gejala dan keadaan (Suharsimi Arikunto, 1990). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian corona virus d kampung wisata warung boto.
2. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur akan dilakukan terhadap pengelola kampung wisata warung boto, dan dinas pariwisata kota Yogyakarta.

3. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan foto, data dan bahan-bahan pustaka yang menunjang topik penelitian
4. Wawancara. Wawancara akan dilakukan terhadap key person terkait pemerintah daerah yaitu dinas pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan multistakeholders pariwisata di Kota Yogyakarta.

Pembahasan

Kampung Wisata Warung Boto berdiri dengan inisiasi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2010. Para pegiat wisata kampung wisata di Kalurahan Warung Boto kelompok jaringan pegiat wisata di Kalurahan Warung Boto dengan nama “Warto Wisata” Warung Boto Wisata. Kampung Wisata Warung Boto terletak di Umbulharjo 4/1021 RT 38 RW 09 Warung Boto. Konsep Pengembangan Kampung Warung merupakan wisata edukasi, budaya, dan sejarah. Lokasi Kampung Wisata Warungboto berdekatan dengan situs sejarah bangunan peninggalan HB II yang berupa petilasan atau situs yang bernama Situs Tok Umbul atau Situs Warung Boto, Umbulharjo dan Pesanggrahan Rejo Winangun, Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Potensi dari kampung wisata warung boto meliputi potensi kerajinan, kuliner, homestay dan hotel. Potensi kerajinan meliputi kreasi daur ulang sampah, kreasi kembang tebu dan kreasi pewarnaan shibori. Adapun potensi kuliner meliputi aneka baceman, minuman wedang seruni, minuman wedang setup dan makanan ringan Bendul. Homestay dan Hotel yang terletak di lingkup kampung wisata warungboto adalah Homestay Omah Mapan dan Livin Yogya Hotel. Adapun kegiatan dan paket wisata yang dikembangkan di Kampung Wisata Warung Boto adalah:

1. Merti Tuk Umbul. Merti tuk umbul merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar di Kampung Wisata Warung Boto. Kegiatan ini digelar pada saat menjelang memasuki bulan suci Ramadhan dengan Konsep Padusan. Kegiatan disertai dengan pengambilan air suci dari belik lanang dan belik wadon yang diarak menuju area Situs Warung Boto dengan menggunakan jodhang yang berisi peralatan ibadah dan alat sholat. Arak-arakan diikuti dikawal oleh bergada Wira Tirta Brata. Kegiatan Merti tuk umbul juga menyediakan paket wisata event untuk mengikuti rangkaian upacara Bentara Budaya Mreti Tuk Umbul dengan harga paket Rp. 500.000. Fasilitas paket ini adalah sewa pakaian tradisional gagrak jogja dan mengikuti rangkaian upacara.
2. Wisata Edukasi Pelatihan Shibori Situs Warungboto-Wisata Air “Dermaga Cinta”. Pelatihan Edukasi mewarnai dengan kain shibori. Fasilitas paket ini adalah makanan & minuman khas kampung Wisata Warung Boto- Wisata Air dan Kain Shibori. Harga paket ini adalah Rp. 350.000 perorang dengan minimal pemesanan 25 orang. Sedangkan paket wisata khusus Pelatihan

dan pewarnaan kain shibori dan kunjungan ke situs warung boto harga paket adalah 250.000 orang per paket.

3. Wisata Edukasi Pelatihan Daur Ulang Sampah dan kunjungan ke Situs Warung Boto. Wisata Edukasi Pelatihan Daur Ulang Sampah dan kunjungan ke Situs Warung Boto dengan fasilitas Makanan dan minuman khas kampung warung boto dan souvenir kerajinan. Harga per paket adalah 175.000 perorang.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid-19 di obyek wisata mengacu pada Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/11652/SE/ 2020 dan Surat edaran Kepala Dinas Pariwisata 556/266/SE/VIII/2020 tentang Self Assesment Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease di Bidang Usaha Pariwisata untuk Daya Tarik Wisata, Penyediaan Akomodasai dan Penyediaan Usaha Jasa Makanan dan Minum. Sasaran kebijakan tersebut adalah dengan menciptakan kegiatan wisata yang aman dan nyaman dari ancaman virus corona. Pencapaian Standar kebijakan pengendalian dan pencegahan covid 19 menurut Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/11652/SE/2020. Standar mengikuti Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian covid-19 pada masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta.

Kebijakan ini secara umum meliputi adanya protokol umum dan protokol khusus protokol khusus meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, perdagangan, perhubungan dan pelayanan masyarakat oleh masing masing SKPD dalam bentuk peraturan walikota. Perangkat daerah melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian virus corona disease-19. Dilakukan penutupan tempat usaha atau kegiatan jika terjadi transmisi dan ketidak siapan dan ketidak patuhan terhadap protokol kesehatan. Obyek Kampung Wisata Warung Boto telah mendapatkan mengetahui adanya standar khusus pengendalian dan pencegahan covid-19 dalam bentuk kebijakan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/11652/SE/2020 dan Surat edaran Kepala Dinas Pariwisata 556/266/SE/VIII/2020 dan sudah menerapkan sebagian standar. Kampung Wisata Warung Boto bahkan menjadi salah satu pilot project percontohan pengendalian dan pencegahan covid-19 secara nasional mewakili Provinsi Yogyakarta.

Beberapa standar tidak dilakukan oleh Kampung Wisata Warung Boto dan dan juga berapa kampung wisata dengan pertimbangan, kampung wisata tidak akan melakukan kegiatan wisata sampai kondisi benar-benar aman untuk dilakukan. Standar pengendalian dan pencegahan Covid19 yang tidak dilakukan oleh Kampung wisata warung boto meliputi: mengisi formulir surat pernyataan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 19 di lokasi usahanya,

melaksanakan Self Assesment (penilaian mandiri) penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendaliamn Corona Virus Disease-19 dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mengirimkan surat pernyataan hasil self assesment (penilaian mandiri) kepada tim verifikasi Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid Corona Virus-19 di bidang Usaha Pariwisata Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Sampai dilakukan kunjungan penelitian tahun 2022 kampung wisata warung boto baru melakukan 2 kali even kegiatan pariwisata dengan permintaan khusus pemerintah untuk melakukan simulasi pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Dengan tidak dilakukannya beberapa standar protokol pengendalian dan pencegahan covid tersebut maka otomatis standar beberapa standar speerti penerbitan surat keterangan hasil verifikasi oleh tim dan dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga tidak ada. Dengan tidak dilakukan beberapa standar tidak berdampak pada terjadinya penyebaran virus covid-19 karena minimnya kegiatan pariwisata yang diadakan. Tidak terjadi adanya penutupan atraksi wisata yang disebabkan oleh pengelolaan kampung wisata warung boto. Sistem reservasi wisata Kampung Wisata Warung Boto ada sistem aplikasi Kota Yogyakarta yaitu Visiting Yogya dan Aplikasi Jogja Smart Service di Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendataan Wisatawan dengan menggunakan sistem *barcode*.

Standar pengendalian dan pencegahan covid-19 di tempat wisata juga mengacu pada surat edaran Kepala Dinas Pariwisata 556/266/SE/VIII/2020 tentang Self Assesment Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease di Bidang Usaha Pariwisata untuk Daya Tarik Wisata, Penyediaan Akomodasai dan Penyediaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Isi Kebijakan tersebut meliputi kepemilikan standar sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan prosedur terkait pengendalian dan pencegahan covid-19 di obyek wisata. Standar sarana dan prasarana meliputi kepemilikan terhadap: (a) audio announcer, (b) wastafel tempat mencuci tangan, (b) rambu-rambu menjaga jarak minimal 1 meter, (c) alat penyembrot sabun, (d) cairan disinfektan, (e) QR qode, (f) tempat pembuatan sampah tertutup, (g) alat kebersihan. Kampung wisata warung boto telah memiliki kelengkapan standar sarana dan prasarana dengan hibah bantuan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kekurangan peralatan adalah peralatan announcer.

Kampung Wisata Warung Boto mempunyai standar Prosedur Pengendalian dan pencegahan covid-19 berupa standar operasional prosedur penerapan manajemen resiko dan rencana ketangguhan dan standar operasional prosedur penerimaan kunjungan. Kampung wisata warung boto juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat saat melakukan event wisata untuk melakukan pencegahan covid-19. Kampung wisata warung Boto belum memiliki surat keputusan tugas pengawas protokol kesehatan. Kondisi ini disebabkan gugus tugas pengawasan protokol kesehatan melekat pada gugus tugas pengawasan protokol kesehatan di Kalurahan.

Kampung Wisata Warung Boto selalu melakukan ceklist harian tentang penerapan sop. Kegiatan disinfektan lokasi minimal 3 hari sekali dilakukan pada masa Level 2, dan 3 yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi pada tahun 2022 saat level PPKM 1 maka sudah jarang dilakukan. Standar kesehatan tentang kesehatan pengelola dan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan memastikan riwayat kesehatan pengelola yang mudah dipantau dikarenakan pengelola masih dalam satu lingkup kalurahan. Daftar nomor telepon rujukan seperti daftar nomor telepon BPBD, fasilitas kesehatan rujukan covid dan kepolisian, belum dimiliki oleh pengelola. Prosedur pengecekan suhu bagi petugas dan wisatawan sudah dilakukan setiap kali pengadaaan event, Prosedur pembersihan dengan air bersih, wajib masker, scan barcode bagi pengunjung, himbauan memenuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan sudah ada prosedur nya dan sudah dilakukan.

Sumber Daya

Sumber daya pengelolaan kampung wisata Warung Boto berasal dari pemasukan event wisata yang belum banyak dilakukan lagi pasca pandemi covid-19. Oleh karena itu, sumber daya juga masih terbatas jumlah. Sumber daya untuk pengendalian dan pencegahan covid-19 berasal dari bantuan Dinas Pariwisata yang membantu sarana dan prasarana, serta partai politik dan pemerintah desa yang membantu disinfektasi desa. Terkait dengan sumber daya manusia banyak mendapatkan pelatihan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berupa pelatihan pemandu wisata, digital pemasaran, homestay, pengolahan limbah, manajemen cinderamata dan kuliner. Standar sumber daya manusia meliputi (a) pembentukan gugus tugas pencegahan covid-19, (b) petugas pengukur suhu/pendataan, (c) petugas audio *announcer*. Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dan petugas pengukur suhu di kampung wisata warung boto menyatu dengan gugus tugas Kalurahan Warung Boto karena banyaknya kesamaan anggota masyarakat yang menjadi aktifis jaringan pariwisata warung boto dan anggota terlibat dalam kegiatan di Kalurahan Warung Boto. Ketiadaan peralatan *announcer* juga berdampak pada tidak adanya petugas *announcer*.

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi antar element di dalam pengelolaan kampung wisata warungboto. Ketua Pengelola Kampung Warung Boto menyampaikan bahwa Kampung Wisata Warung Boto merupakan sebuah jaringan kelompok pegiat wisata “Warto Wisata”. Dilakukan klusterisasi dalam pengembangan kampung wisata warung boto yaitu kluster kerajinan (RW 1,2, 3), kluster Budaya (RW 5, 8), Kluster Kuliner (RW 6,7,9) (Wawancara dengan Poernomo, 2022).

Karakteristik agen pelaksana

Agen pelaksana kampung wisata warung boto merupakan jaringan aktivis pariwisata dengan bentuk organasi kepengurusan Kampung Wisata Warung Boto. Konsep Kampung Wisata Warung Boto didorong oleh adanya

program pengembangan Kampung Warung Boto pada tahun 2010. Keorganisasian Kampung Wisata Warung Boto sudah mendapatkan bentuk legal dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Kondisi sosial ekonomi dan politik

Pengembangan Kampung Wisata Warung Boto banyak terpengaruh oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Ini terjadi karena salah satu daya tarik kampung Wisata adalah adanya Situs Warung Boto yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Yogyakarta. Sampai saat ini kegiatan wisata disitus itu tidak ada pengelolaan event wisata, secara komersial dan belum ada pemungutan tiket masuk obyek wisata. Hasil dari observasi peneliti pengelola hanya melakukan buka tutup obyek sesuai dengan jam kunjungan wisata. Kondisi ini juga berdampak pada tidak adanya program pengendalian dan pencegahan covid-19 di obyek wisata Situs Warung Boto yang merupakan salah satu daya tarik wisata di Kampung Wisata Warung Boto. Situs Warung Boto pada berdasarkan informasi juga sedang dalam masa renovasi sampai tahun 2026. Proses renovasi dilakukan tanpa menutup obyek wisata situs warung Boto.

Pada saat pandemi covid-19 dimulai pada maret tahun 2020, situs warung boto ditutup untuk umum. Kondisi pandemi covid-19 yang masih ada membuat kampung wisata warung boto belum banyak melakukan event Wisata. Setelah adanya penurunan status pandemi menjadi PPKM 1 yang memungkinkan masyarakat lebih leluasa melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Setelah adanya 2 kunjungan wisata dari pemerintah untuk meninjau kesiapan kampung wisata dalam melakukan pengendalian dan pencegahan event covid-19. Event wisata di Kampung Wisata Warung Boto dimulai lagi pada dengan adanya Merti Tuk Umbul untuk menyambut Bulan Ramadhan tahun 2022. Selanjutnya, event wisata di Situs Warung Boto yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Yogyakarta baru mulai dibuka setelah Hari Raya Idul Fitri 2022 bersamaan dengan menurunnya status pandemi covid-19.

Penutup

Standar pengendalian dan pencegahan covid-19 di obyek wisata di Kota Yogyakarta mengacu pada Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/11652/SE/2020 dan Surat edaran Kepala Dinas Pariwisata 556/266/SE/VIII/2020. Standar pengendalian *self assesment* dan penilaian hasil assesment belum dilakukan oleh kampung wisata warung boto terkait dengan kondisi pandemi yang tidak menentu dan pembatasan kerumunan. Pengelola merasa self assement lebih fokus pada obyek wisata, bukan kampung wisata. Standar sarana dan prasarana sudah banyak tersedia dengan adanya bantuan dari berbagai pihak terutama dari Dinas Pariwisata. Standar ketersediaan SDM dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19 tersedia dengan bekerjasama dengan gugus penanggulangan covid kalurahan. Dokumen Standar SOP prosedur tersedia. Sumber daya pendanaan masih mengandalkan bantuan dari stakeholders terkait pengendalian dan

pencegahan Covid-19. Komunikasi antar organisasi dalam jaringan kampung wisata, gugus pengendalian dan pencegahan Covid-19 desa dan dinas pariwisata sangat penting untuk menekan keterbatasan sumber daya. Legalitas organisasai pengelola kampung wisata sangat mendukung akses pendanaan ke berbagai multi *stakeholders*. Status pengelolaan situs warung boto menjadi salah satu kendala lemahnya pengendalian dan pencegahan Covid-19 di Kampung wisata warung Boto. Saran untuk dapat mengetahui kondisi umum tentang pengendalian dan pencegahan Covid-19 di kampung wisata bisa dilakukan penelitian lagi dengan objek kampung wisata yang lain, karena kampung wisata warung boto merupakan salah satu dari percontohan pengendalian dan pencegahan Covid-19 di tempat wisata mewakili Provinsi Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Agustinus Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kampung Wisata Warungboto. Yang diakses pada <https://pariwisata.jogjakota.go.id/detail/index/82>
- Eva Latifah Puspita Sari dan Dyah Widiyastuti. 2019. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta. Jurnal Bumi Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Geografi Univesitas Gadjah Mada.
- Lexy J. Moleong. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Made Antara dan Nyoman Sukma Arida. 2015. Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal. Depansar: Konsorsium Riset Pariwisata Univesitas Udayana Bali.
- Rizal Kurniasih dan Muhammad Sultan Hali. 2018. Kajian Potensi Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism) Sebagai Daya Tarik Wisata Kota Mataram Provinsi Nusa tenggara Barat. Jurnal Media Bina Ilmiah Vol. 13 No. 2.
- Suharsimi Arikunto. 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Unesco. 2009. Ekowisata: Panduan Dasar Pelaksanaan. Yang diakses pada <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185506>